

NU ANTARA POLITIK PRAKTIS DAN KHITTAH

Sumarta

STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu

ahmadfuady33@gmail.com

DOI : 10.556556/kisj.v4i1.73

Disubmit: (08-01-2022) | Direvisi: (14-02-2022) | Disetujui: (01-04-2022)

Abstract

The results of the 34th NU Congress in Lampung in 2021 resulted in a major recommendation within the NU body. There are at least two major agendas that are promoted and offered by Gus Yahya. First, NU will revive Gus Dur's thoughts. Gus Dur's thoughts included returning NU to Khittah as NU would not be involved in practical politics. Second, NU will be the motor for world peace. Considering that NU is currently the largest religious organization in the world. It is natural for NU to take a role in the international arena. NU's practical politics have indeed been carried out and NU was involved in the party in 1955 and when Gus Dur's leadership NU returned the functions and roles of NU to its initial function when NU was founded. Gus Yahya's decision by offering and taking firm steps that NU in the election of President and Vice President in the future period will not institutionally provide institutional recommendations. However, personally, NU citizens as Indonesian citizens give them the right to freely choose and decide their choice for one particular candidate.

Keywords: NU, Politics, Khittah

Abstrak

Hasil Mukhtamar NU ke 34 di Lampung tahun 2021 menghasilkan sebuah rekomendasi besar dalam tubuh NU. Setidaknya terdapat dua agenda besar yang diusung dan ditawarkan oleh Gus Yahya. Pertama, NU akan menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Gus Dur. Pemikiran-pemikiran Gus Dur tersebut diantaranya adalah mengembalikan NU ke Khittah seperti NU tidak akan terlibat dalam politik praktis. Kedua, NU akan menjadi motorik terhadap perdamaian dunia. Mengingat NU saat ini adalah organisasi keagamaan terbesar di dunia. Sudah sewajarnya NU mengambil peran dalam kancah dunia internasional. Politik praktis NU memang pernah dilakukan dan NU terlibat dalam kepartaian di tahun 1955 dan ketika kepemimpinan Gus Dur NU mengembalikan fungsi dan peranan NU pada fungsi awal pada saat NU didirikan. Keputusan Gus Yahya dengan menawarkan dan mengambil langkah tegas bahwa NU dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di periode mendatang secara institusional tidak akan

memberikan rekomendasi secara kelembagaan. Akan tetapi secara personal warga NU sebagai warga negara Indonesia memberikan hak sebebaskan – bebaskan untuk memilih dan memutuskan pilihannya kepada salah satu calon tertentu.

Kata Kunci : NU, Politik, Khittah

Latar Belakang

Pasca muktamar NU ke 34 di Lampung dengan tegas dan terang-terangan serta lantang Gus Yahya menyatakan bahwa NU pada perhelatan politik tahun 2024 tidak akan ikut politik praktis. NU tidak akan mengajukan calon baik sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Gerakan ini diawali oleh Gus Yahya dengan menyambangi istri Almarhum Gus Dur Ibu Hj. Sinta Nuriyah. di Ciganjur, Jakarta Selatan dengan maksud dan tujuan minta di doakan agar selama memimpin NU Gus Yahya dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi umat Islam. Gerakan ini dibarengi dengan diterbitkannya sebuah buku yang berjudul Menghidupkan Gusdur yang ditulis bersama Jurnalis Senior AS Laksana.

Gerakan dan langkah dari Gus Yahya ini tentunya sudah tidak mustahil lagi akan menjadi perbincangan dan tamparan keras bagi kelompok-kelompok tertentu yang terbiasa dengan menggunakan politik identitas. Hal ini mengingatkan penulis akan keberanian Gus Yahya saat membacakan Dekrit Presiden Gus Dur pada saat akan dilengserkan.

Gerakan Gus Yahya bahwa dalam perhelatan kontestasi politik Tahun 2024 tidak mendorong dan mendukung secara kelembagaan akan tetapi Gus Yahya mempersilahkan kepada warga NU untuk bebas memilih Capres dan Cawapres karena itu sebagai hak tiap warga negara. Hal yang tidak diperkenankan adalah dukungan PBNU secara institusional.

Khawatiran Gus Yahya akan terpecahnya umat negara kontestasi politik praktis. Isu identitas agama memang sangat rawan untuk memicu terjadinya chaos dalam kebangsaan yang mengakibatkan kerugian dan baik dalam organisasi maupun rakyat itu sendiri. Mengingat organisasi keagamaan di Indonesia tidak hanya NU akan tetapi ada organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah, Persis dan lainnya. Memang secara matematika organisasi NU adalah organisasi terbesar keagamaan di Indonesia bahkan di dunia. Akan tetapi isu identitas keagamaan menjadikan bangsa terpecah belah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka).¹ Jenis penelitian yang akan digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) artinya suatu model yang digunakan untuk meneliti dokumentasi data berupa teks, gambar, symbol dan lain sebagainya.

Teknik penelitian analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus dalam pemrosesan data ilmiah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan membuka wawasan baru dalam menyajikan fakta.

¹ Lexy J. Moleong. metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja. Rosdakarya. 2005.) hlm. 4

Penggunaan metode analisis isi ini dapat digunakan pula untuk meneliti suatu dokumen baik dokumen audio visual maupun teks tentang kajian.

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi analisis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer akan digunakan untuk memperoleh data utama atau data pokok sebagai sumber penelitian.

Data primer berupa teks yang diperoleh hasil wawancara dengan informan untuk direkam dan dicatat. Data primer tersebut diperoleh dalam bentuk teks seperti dokumen, surat-surat, buku-buku karya tulis informan, dan gambar dan suara seperti film, video, dan rekaman-rekaman kegiatan informan.

Data sekunder adalah berupa data-data yang telah tersedia yang diperoleh dari hasil membaca, melihat dan atau mendengarkan. Data sekunder ini berasal dari hasil olahan data primer sebelumnya.²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Organisasi NU di antara keberagaman Organisasi Keagamaan di Indonesia

Munculnya berbagai organisasi keagamaan di Indonesia memang tidaklah lepas dari stigmatisasi keagamaan di masa lalu. Bahwa akan muncul banyak golongan yang mengatasnamakan agama. Di Indonesia organisasi keagamaan yang paling banyak pengikutnya dan dianggap paling fleksibel serta dekat dengan masyarakat. Munculnya banyak organisasi keagamaan dilator belakangan akibat dari perbedaan ideology, representasi dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan itu dimanifestasikan dalam bentuk organisasi keagamaan sebagai wujud perkumpulan para anggota yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama agar terlibat dalam proses menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan umat.

Secara alamiah pembelahan dan pengelompokan masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu sebagai representasi kepentingan umat beragama yang berbeda. Persoalannya bukan pada pembelahan umat kedalam kelompok-kelompok tertentu terutama pasca reformasi dengan kemunculan Gus Dur yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto adalah bentuk dari munculnya dan mencuatnya identitas keberagaman salah satu kelompok tertentu.

Polarisasi keberagaman dalam politik praktis memang tidaklah selalu menjadi transenden buruk dalam menjalin persatuan kebangsaan akan tetapi muncul dampak positif dari sisi pelaksanaan perhelatan demokrasi negara kita. Positifnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perhelatan dan pelaksanaan demokrasi semakin meningkat.

Pemilu langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembangnya pertentangan ideologis secara sistemik. Mengingat sistem politik Indonesia masih menganut sistem kepartaian. Maka akan sulit bagi calon untuk maju sebagai calon perseorangan dalam kontestasi politik kekuasaan tanpa masuk dan bergabung dalam partai. Memang semua partai berjuang sesuai dengan ideologi platform partai yang dinaunginya. Akan tetapi perlu diingat bahwa ideologi partai dibangun dan

² Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.) hlm. 4

didorong ke arah ideologi yang sifatnya propaganda, bersebrangan dan menumbuhkan kebencian kepada lainnya dengan maksud dan tujuan untuk menarik simpatik dari masyarakat agar memilih partainya.

Sebetulnya garis perjuangan partai politik lurus dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun tidak jarang dan sebagian besar garis perjuangan politik kita masih dikaburkan dan kalah oleh kepentingan kontestasi politik. Kepentingan elektoral masih menonjol ketimbang kepentingan besar menjadikan kehidupan bangsa yang lebih baik dan sejahtera. Sistem kepartaian kita masih cenderung mengartikan bahwa perjuangan partai masih secara sempit dan masih cenderung bersifat mementingkan kebutuhan jangka pendek.

Polarisasi politik mengakibatkan hamper timbulnya perpecahan yang menganga lebar antar umat. Bahkan elit politik dan tokoh keberagamaan pun sulit untuk mengendalikan arus bawah. Mengingat elit beragama masih menyimpan dan memiliki perbedaan dalam kepentingan dalam memperjuangkan umatnya masing-masing. Politik praktis elit keberagamaan memunculkan basis dukungan kelompok umat beragama sebagai basis dukungan dalam kointasi politik. Ideologi politik pun selalu diartikan dan diarahkan secara sempit sebagai manifestasi dari orang kita dan kelompok kita.

Umat dapat memiliki jarak sosial dan politik terhadap sebuah partai yang didasarkan pada perbedaan identitas sosial dan politik yang mereka miliki. Menjadi sebuah persoalan ketika terdapat pertentangan dan penolakan terhadap kontestan yang berasal dari berbeda agama. Basis sosial, politik, kedaerahan dan perbedaan identitas lainnya tidak akan pernah mendapatkan ruang dalam proses demokrasi. Identitas yang dimaknai secara sempit yang diartikan umat sebagai pemilih simpatisan kuat yang sulit tergoyahkan dan pindah ke kontestan lawan dapat mendorong antar umat untuk saling caci maki dan larut dalam politik kebencian akibatnya akan terjadi benturan masa akibat perbedaan pilihan politik. Sebetulnya polarisasi politik keberagamaan di Indonesia tidak akan terjadi ketika kontestan politiknya terdapat lebih dari 2 (dua) calon.

Pengertian Politik Praktis

Politik pada dasarnya adalah kekuasaan. Dahulu sebelum konsep dan wacana politik menjadi sebuah ilmu pengetahuan politik praktis seringkali diartikan sebagai perang atau benturan fisik antara dua kubu untuk memperebutkan kekuasaan. Saat ini ketika ilmu pengetahuan mendapatkan tempat politik praktis banyak diartikan sebagai sarana transaksional kepentingan, pembunuhan karakter, saling menghancurkan strategi dan taktik, saling berebut territorial konstituen, saling beradu ideologi dan tawaran untuk menarik simpati publik.

Secara etimologi politik berasal dari bahasa belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics* serta bahasa Yunani *polisteia*. *Polis* berarti kota/Negara kota yaitu kesatuan masyarakat yang mengurus dirinya sendiri dan *teia* artinya urusan.

Jadi makna politik secara bahasa adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari se-kelompok masyarakat atau Negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga makna,³ yaitu:

1. Politik bermakna pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan);
2. Politik bermakna segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang, ekonomi, dan kebudayaan, partai, organisasi;
3. Politik bermakna cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan: dagang; bahasa nasional.

Beberapa pengertian politik yang berangkat dari pandangan politik beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kehidupan bersama segala hal yang berkaitan dengan negara dan pemerintah
2. Segala kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan
3. Segala kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik atau masyarakat umum
4. Suatu konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan dari sumber-sumber yang penting
5. Kegiatan yang berkaitan dengan masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.⁴

Sedangkan Pengertian politik praktis secara eksplisit bermakna bahwa segala tindakan politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Politik praktis merupakan implementasi dari perilaku politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.⁵

Politik praktis terjadi pada saat pesta demokrasi dilaksanakan. Utamanya pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam skala nasional dan pemilihan Kepala Desa dalam skala kecil atau serendah rendahnya. Kondisi konstelasi pemilihan ini memanas ketika calonnya terdapat 2 kontestan.

Politik praktis memang berbahaya karena implementasinya menghalalkan segala macam cara untuk menjegal strategi dan taktik kontestan lainnya. Politik praktis memang sering sekali dikonotasikan sesuatu yang negatif dalam praktek ranah perpolitikan.

Politik Praktis dalam Islam

Politik dalam Islam kenal dengan istilah *Siyasah*. *Siyasah* dapat diartikan sebagai orientasi menggapai kekuasaan. Islam memandang bahwa politik sebagai sarana untuk menyempurnakan pengabdian kepada Allah SWT.

³kbbi.kemdikbud.go.id

⁴ Puput Purwanti, *Apa Itu Politik Praktis ? dan Korelasinya Dengan Isu Sara*. 2014

⁵ ibid

Istilah politik dalam Islam berarti bagaimana politik dalam perspektif Islam. Dalam Islam selalu menerima dan terbuka akan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan Islam selalu menjadi pelengkap dan penyempurna terhadap keilmuan-keilmuan yang sebelumnya.

Orientasi politik praktis dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Dalam Islam tetap mendudukan kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan Allah. Sementara manusia pada dasarnya tidaklah memiliki daya upaya apa-apa.

Islam mengkaji bagaimana hubungan antara Islam dan politik. Politik dalam Islam bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki peradaban tinggi dan maju berbasiskan nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang nilai-nilai iman, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis dan bergotong-royong menjaga kedaulatan negara.

Masyarakat madani memang perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam konteks ke-Islaman, dalam konteks kenegaraan dan dalam konteks kemanusiaan.

Sederhananya politik dalam Islam memang diperbolehkan kerana itu adalah hak setiap warga negara. Identitas politik dalam Islam ditandai dengan masuknya tokoh-tokoh elit Islam terlibat dalam politik. Terlibat baik dalam kepengurusan maupun maju sebagai kontestan. Masuk dan terlibatnya tokoh elit Islam akan menjadikan dan menimbulkan polarisasi dalam politik kebangsaan. Dan hal tersebut sangat terasa sekali ketika kontestan yang ada hanya 2 (dua) kontestan. Perseteruan dan konflik pasca pemilihan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2019 sangat terasa sekali antara kubu Jokowi dan Maruf Amin dengan Prabowo dan Sandiaga Uno.

Identitas Simbolik Dalam Organisasi Keberagamaan

Membangun dukungan bukanlah suatu fenomena kelompok yang terjadi secara tiba-tiba. Wacana sepihak dan bertentangan dengan pihak lain memunculkan sebuah awacana identitas keradaan suatu kelompok tertentu. Munculnya segmentasi kepentingan internal menjadikan tertutupnya ruang dialog dan memunculkan elit tokoh tertentu menjadi solusi bagi segala persoalan dan memiliki dimensi yang lintas batas. Kontestasi kekuasaan menjadikan ruang publik seperti pasar dengan dasar hukum permintaan dan penawaran. Transaksional dalam mencapai kepentingan tak dapat terelakan dan memunculkan nilai ekonomis bahkan bisa saja terjadi transaksi simbolik, ideologis bahkan transaksi politik uang dan kekuasaan.

Tidak ada proses penggapaian kepentingan untuk meraih kekuasaan tertentu tanpa melalui transaksional. Semua bermuara pada kebutuhan sebagai sarana jalan pintas sebagai sarana proses regenerasi kepemimpinan yang baru. Terkadang leadership pergantian kepemimpinan sebuah lembaga atau organisasi terkalahkan oleh leader karbitan yang mampu terorbitkan kerana faktor kuatnya politik keluarga (dinasti) dan atau kuatnya kharismatik personal yang muncul sebagai elit politik yang lintas batas.

Dan sudah banyak dimafhumi bahwa regenerasi kepemimpinan masih kental dengan menggunakan jalur tradisional, karismatik dan karismatik ketimbang jalur regenerasi yang dihasilkan dari kaderisasi yang sudah mapan dalam organisasi.

Sudah menjadi pemandangan umum bahwa jalur regenerasi kepemimpinan berasal dari kepentingan kelompok, kepentingan klan tertentu daripada pertarungan gagasan ideologi dalam ruang demokrasi. Bukan hal yang aneh bahwa regenerasi kepemimpinan suatu organisasi muncul dari kepentingan elit. Dan pemilih (konstituen) hanya berperan sebagai pemilik legalitas atas kepemimpinan yang dimunculkan para tokoh elit melalui pemilihan.

Kepemimpinan politik yang dilahirkan dari jalur tradisional, karismatik dan materialistik tidaklah sepenuhnya menjadi hal buruk bahkan bisa sebaliknya menjadikan popularitas suatu kelompok atau organisasi tertentu menjadi meningkat tajam dan darastis bahkan banyak pula yang menaruh harapan besar untuk kebaikan ndan kemaslahatan besar bagi umat di masa mendatang.

Pemandangan yang elok dan indah pun dilakukan oleh Gus Yahya dengan menyambangi dna silaturahmi ke kediaman Almarhum Gus Dur dengan menemui dan meminta doa dan nasehat agar kepemimpinannya kelak menjadi mudah dan membawa kemaslahatan besar bagi umat. Setelah itu dua agenda besar Gus Yahya yang telah dihasilkan dalam Mukhtamar NU yang ke 34 di Lampung, yaitu menuju kemandirian umat dan menjadikan serta menjaga perdamaian di dunia mulai ditampilkan secara perlahan dengan memberikan sinyal merah kepada Partai Politik yang selama menginduk pada organisasi besar NU, yaitu PKB dengan secara institusional NU secara kelembagaan.

Khittah NU dan Kepartaian di Indonesia

Wacana khittah dalam NU sebetulnya sudah ada sebelum NU itu berdiri. Makna Khittah dalam NU sendiri mendapatkan tempat dan pengertian yang jelas ketika Mukhtamar NU ke 27 di Situbondo. Tercatat dalam sejarah pada 16 Rajab 1344 Hijriyah atau 31 Januari 1926 Masehi adalah tanggal berdirinya organisasi NU⁶. Khittah pada awal sebelum NU dimaknai dengan bahwa pelaksanaan keagamaan di Indonesia adalah ciri khas kepribadian umat Islam di Nusantara.

Makna Khittah dalam NU mendapatkan tempat dan pengertian yang jelas pada saat Mukhtamar NU ke 27 Tahun 1984 di Situbondo yang menyatakan bahwa Khittah NU adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga NU. Landasan itu ialah paham Ahlusunah Waljama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia.⁷

Rumusan tentang masalah landasan pemahaman NU dalam Khittah ditegaskan secara detail bahwa dasar-dasar pemahaman keagamaan NU adalah bersumber pada Al-Quran, As-Sunah, Al-Ijma dan Al-Qiyas. Dalam pemahaman terhadap Aqidah Khittah NU adalah mengikuti faham Ahlusunah Waljamaah yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Di bidang Fiqih Khittah NU

⁶ A Khairul Anwar, *Makna Khittah NU*. 2014

⁷ Ibid

menganut dan mengikuti salah satu dari empat madzhab dan di bidang tashawuf NU mengikuti salah satu di antaranya adalah Imam Baghdadadi dan Imam Al-Ghozali.

Sikap NU dalam masyarakat dalam Khittah NU dinyatakan dengan 4 sikap. Adapun empat sikap dalam kemasyarakatan NU yang terumus dalam Mukhtamar adalah pertama, sikap *tawassuth* dan *i'tidal* artinya bahwa NU dalam bermasyarakat berada di tengah-tengah, menjadi panutan, bertindak lurus, bersifat membangun dan tidak ekstrim. Kedua, sikap *tasamuh*. Tasamuh adalah sikap toleran dalam perbedaan pendapat keagamaan, kemasyarakatan dan kebudayaan. Ketiga, Sikap *tawazun*. *Tawazun* adalah sikap menjaga keseimbangan dalam berkhidmat kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, kepada lingkungan hidup, serta menjaga keselarasan antara masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Keempat, *amar ma'ruf nahi munkar*. Sikap kepekaan untuk mendorong agar kita melakukan perbuatan baik dan mencegah segala hal yang dapat merendahkan nilai-nilai kehidupan.⁸

Pada dasarnya khittah 1926 adalah sebuah semangat yang menjiwai organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk melepaskan diri dari ikatan politik praktis. Keterlibatan NU dalam politik praktis, saat itu, dianggap telah berlebihan sehingga meninggalkan komitmen dasarnya sebagai organisasi sosial kerakyatan. Semangat kembali ke khittah 1926, yang dicituskan dalam Mukhtamar di Situbondo 1984, merupakan ruh dan dasar acuan para elite NU dalam menjalankan roda organisasinya.

Perjalanan khittah 1926, NU telah menjadi bagian kekuatan *civil society* yang cukup diperhitungkan di negeri ini. Namun dalam rentang sejarah perjalanan khittah, ruh dan semangat *khittah* kian kabur seiring kian intensifnya keterlibatan para elite (kia) NU dalam politik praktis pada era reformasi ini.

Dalam prakteknya, semangat kembali ke khittah 1926 mudah sekali dimanipulasi oleh logika-logika yang sifatnya legal-formal, sehingga secara *de-jure* NU mungkin tidak berpolitik, tapi secara *de-facto*, gerakan-gerakannya sangat sarat dengan nuansa politik praktis. Kecenderungan organisasi NU dalam politik sebagai akibat keterlibatan yang berlebihan para elite NU dalam dunia politik, menempatkan NU sekedar alat legitimasi dan kendaran politik para elitnya.

Khittah memang menjamin warga NU untuk berpolitik, namun sejauh mana praktek politik para elite NU tersebut berimbas pada netralitas NU? Pertanyaan ini tidak pernah dibahas, karena mungkin secara legal-formal para elite NU berdalih tidak menyalahi aturan-aturan formal yang tercantum dalam rumusan khittah 1926. Tapi dilihat dari sisi semangat yang menjiwai khittah 1926, jelas mereka bisa dikatakan berkhianat terhadap NU. Akibatnya, politisasi di tubuh NU terus terjadi, dan dari waktu ke waktu kian tak terkendali. Kenyataan ini menunjukkan bahwa khittah 1926 berada pada situasi krisis yang tidak menguntungkan bagi perjalanan NU ke depan. Eksistensi NU menjadi tidak jelas: antara organisasi sosial-keagamaan dan organisasi politik.⁹

Cak Imin (Abdul Muhaimin Iskandar) Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam media nasional menyatakan bahwa keputusan Gus Yahya mengembalikan NU ke Khittahnya menjadi

⁸ ibid

⁹ Achadi, Muhamad. *Khittah 1926 dan problematika politik NU dalam era reformasi*. 2004.

NU semakin naik level dan menjadikan NU sebagai politik sebagai perangkat perjuangan yang lebih luas. Tegas Cak Imin kembali ke Khittah bukan berarti NU melepaskan diri secara sepenuhnya dari politik tapi politik hanya dijadikan bagian dari salah satu sarana NU dalam memperjuangkan NU untuk umat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa NU welcome terhadap semua partai dan tidak akan mendukung secara buta terhadap salah satu partai saja. Walaupun partai itu pendiri dan penggagas utamanya adalah Gus Dur itu sendiri.¹⁰

NU secara jelas naik pangkat dan levelnya dalam hal keterlibatan NU dalam dunia politik dengan tidak hanya mengandalkan satu partai saja. Dan legitimasi pun akan sangat mudah diperoleh ketika semua partai welcome dan di sinilah maksud dari Gus Dur bahwa NU tidak hanya untuk satu golongan tertentu saja. Melainkan NU hadir dari umat dan dikembalikan lagi kemaslahatannya untuk umat dengan NU menjadi penengah, pengayom dan pengambil inisiasi dalam setiap kebijakan dan inilah sesungguhnya marwah dan ruh NU sesungguhnya.

Politik NU sangatlah cerah dengan menerima kehadiran semua partai dan menyatukannya dalam wadah yang bernama NU. Selama masa pesta demokrasi digelar NU seakan akan terpecah belah dan tersebar kemana-mana tentunya akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa ketika NU bersatu dan tidak memarginalkan salah satu partai politik saja. Mengingat basis masa NU sangatlah besar di Indonesia. Sungguh ini sangatlah disayangkan ketika ini tidak dapat dimaksimalkan dengan baik potensi-potensi yang ada apada NU.

Khittah NU dengan harapan bahwa NU akan melahirkan pejuang-pejuang NU yang handal dalam pemerintahan, kenegaraan dan politik. Bukannya NU akan menjadi kerdil dan mengecil namun Khittah NU akan menjadikan NU sebuah organisasi yang mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan dan kemajuan jaman.

Menurut Fachry Ali terkait tentang Khittah bahwa NU mau tidak mau harus berpolitik karena NU mempunyai basis masa yang menguasai sebagian besar penduduk Indonesia. Warga NU memang sami'na watho'na (patuh) terhadap elit-elit NU. Maka ini sungguh sangat disayangkan jikalau elite NU tidak mau berpolitik dan sudah bisa dipastikan basis masa NU akan dimanfaatkan dan digunakan oleh elite politik di luar NU.¹¹

Masa yang besar memang menjadi minat dan perhatian publik dalam dunia politik. Masa NU yang besar memang menjadi godaan tersendiri bagi para elite NU untuk berpolitik. Dan jika keadannya demikian justru ini akan menjadi titik dilemanya NU. Dan secara otomatis kata Khittah NU tahun 1926 sudah tidak relevan lagi secara tekstual dalam kehidupan masa sekarang. Algoritma NU bagi umat akan sulit tercapai dan terlaksana ketika NU akan memperjuangkan dan memiliki agenda besar yang berkaitan dengan pemerintahan. Karena Indonesia sistem pemerintahannya mengikuti sistem demokrasi keterwakilan. Dan belum tentu mereka yang mewakili yang dipilih dan diusung oleh warga NU yang berasal dari luar NU dapat mewakili dan menjadi wakil bagi warga NU.

¹⁰ Delvira Hutabarat. *Cak Imin: Kembali ke Khittah, Bukan Berarti NU Lepas Dari Politik*. 2021

¹¹ Umar Mukhtar. *Khittah NU 1926 dan Nahdliyyin di Pusaran Politik*. 2021

NU pasca reformasi memang semakin menarik dan terakhir dengan terpilihnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadikan NU menjadi perhatian dan diperhatikan serta menjadi perhatian dalam setiap rezim. Dan NU dalam rezim siapa pun akan selalu diakomodasi segala apa yang menjadi kepentingan dan kebijakan NU.

Persoalan NU bermetamorfose menjadi lembaga politik atau tidak menurut Fachry Ali itu tidaklah penting. Masa NU yang besar menjadikan NU selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi elit politik dan NU mending lebih memilih non beroposisi daripada beroposisi. NU memiliki tujuan politik selalu tidak beroposisi karena jika NU beroposisi dengan pemerintah maka sudah jelas dan bisa dipastikan bahwa gerakan - gerakan NU dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi untuk kebutuhan umat yang lebih besar akan tersendat dan menjadi jalan buntu. Dan dalam kalkulasi para elit NU dengan mengambil jalan tidak beroposisi karena sudah bisa di tebak bahwa daya tawar masa NU yang besar adalah jawabannya.

Memang sudah tidak dipungkiri ketika NU berada dalam lingkaran kekuasaan proses mobilitas dan gerakan NU secara vertical dari bawah ke atas mulai dari tingkat desa ke kecamatan bahkan sampai ke pusat akan lebih mudah dan cepat. Hal ini Nampak ketika Khofifah Indraparawarsa menjadi Gubernur Jawa Timur yang kala itu menjadi ketua PP Muslimat NU dan Gus Taj Yasin Putra kedua dari tokoh NU K.H. Maemun Zubaer yang menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Rois Am NU.

NU ketika berada dalam lingkaran kekuasaan memang mobilitasnya akan sangat cepat tetapi mobilitas tersebut belum tentu memberikan hasil positif untuk warga NU. Menciptakan kemandirian NU memang haruslah ditopang dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah karena antara ulama dan umaro memang harus saling bersatu padu dalam membangun bangsa dan negara.

Salah satu jargon Gus Yahya adalah menghidupkan kembali pemikiran Gus Dur dalam NU dengan menyandarkan bahwa dalam perjalanannya NU pernah menjadi Partai Politik pada tahun 1955 dan NU memenangnya. Merasa tidak nyaman di politik kemudian di masa kepemimpinan Gus Dur NU di kembalikan lagi fungsi nya sebagaimana pada maksud awal di dirikannya NU ini. Yakni pada tahun 1926 di mana NU berangkat dari panitia Hijaz yang terdiri dari Kiai-kiai yang menolak dan protes kepada Raja Saudi yang berfahaman Wahabi agar tidak membongkar makam-bersejarah yang berada di tanah suci dan memberikan kebebasan kepada warga untuk menganut berbagai macam madzhab.

Di bawah komando Gus Dur NU keluar dari Zona Politik praktis sehingga kita terkadang terkecoh bahwa khittah NU hanya sebatas dan sekedar keluar dari zona politik. Namun pada hakekatnya khittah NU terumuskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART NU yang diperbarui dalam Muktamar lima tahunan.

Peranan NU Menjaga Perdamaian Dunia

NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas konflik keagamaan di dunia. Dalam perjalanannya NU sudah melakukannya dan Gus Yahya

sendiri yang dijadikan sebagai wakil dari Indonesia dalam perhelatan berbagai kegiatan organisasi keagamaan yang diutus baik oleh pemerintah maupun secara lembaga. Hal ini bukan sekedar jargon dan tawaran kampanye sebagai penarik peserta muktamar untuk memilihnya namun tawaran konsep perdamaian dunia sudah sering kali dilakukan oleh Gus Yahya dalam forum-forum internasional.

Langkah konkrit Gus Yahya dalam perdamaian dunia dapat dilihat pada rekam jejaknya mulai dari Tahun 2014, inisiator pendiri institut keagamaan di California, Amerika Serikat yaitu *Bait ar-Rahmah li ad-Da'wa al-Islamiah Rahmatan li al'Alamin* yang mengkaji tentang agama Islam untuk perdamaian dan rahmat alam. Tahun 2015 tenaga ahli perumus kebijakan pada Dewan Eksekutif Agama Agama di Amerika Serikat - Indonesia. Utusan GP Anshor dan PKB untuk jaringan politik tersebar di Eropa dan Dunia, *Centrist Democrat International* (CD) dan *European People's Party* (EPP). *American Jewish Committee* (AJC) dengan menawarkan gagasan bernas sebagai resolusi konflik keagamaan

Tahun 2018 menjadi pembicara internasional di luar negeri. dalam forum *American Jewish Committee* (AJC) di Israel. Denan menawarkan konsep rahmat, (perdamaian dunia) sebagai solusi bagi konflik dunia, termasuk konflik yang disebabkan agama melalui jalur-jalur penguatan pemahaman agama yang damai.

Tahun 2021, mendapatkan apresiasi tinggi dari tokoh-tokoh perdamaian dunia dalam perhelatan *International Religious Freedom* (IRF) Summit, di Washington, DC, Amerika Serikat dengan menawarkan gagasan *The Rising Tide of Religious Nationalism* (Pasang Naik Nasionalisme Religius).

Adapun konsep dan tawaran Gus Yahya dalam perdamaian dunia adalah sebagai bentuk dinamika bangkitnya nasionalisme religius merupakan bagian metode untuk pertahanan ketika suatu kelompok agama yang biasanya merupakan mayoritas di negaranya merasa terancam secara budaya. Kebangkitan ini pun tidak terelakkan lantaran dunia tengah bergulat dalam persaingan antar-nilai untuk menentukan corak peradaban di masa depan. Selain itu, dinamika internasional telah mengarah pada perwujudan satu peradaban global yang tunggal dan saling berbaur (*single interfused global civilization*). Persaingan yang sengit sangat berpotensi besar memicu permusuhan dan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan dorongan berbagai elemen di dunia menemukan cara untuk mengelolanya sebelum telanjur meletus konflik global yang kian parah.

Solusi yang ditawarkan Gus Yahya adalah dengan menawarkan strategi dan model perdamaian dunia sebagaimana yang selama ini telah dipraktikkan warga Nahdlatul Ulama atau NU. Gus Yahya menawarkan beberapa solusi di antaranya:

1. Langkah awal harus diidentifikasi lebih dahulu nilai-nilai apa yang selama ini telah menjadi kesepakatan bersama. Nilai-nilai itu antara lain kejujuran, kasih-sayang dan keadilan.
2. Dunia harus membangun konsensus atas nilai-nilai yang perlu disepakati agar semua pihak yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan secara damai. Bahkan nilai-nilai tradisional yang menghambat koeksistensi damai pun layak untuk diubah.
3. Strategi NU yang menyatakan bahwa kategori kafir tidak memiliki relevansi hukum dalam konteks negara bangsa modern perlu dikontekstualisasi dalam hal tersebut.

Kesimpulan

Hasil Mukhtamar NU ke 34 di Lampung tahun 2021 menghasilkan sebuah rekomendasi besar dalam tubuh NU. Setidaknya terdapat dua agenda besar yang diusung dan ditawarkan oleh Gus Yahya. Pertama, NU akan menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Gus Dur. Pemikiran-pemikiran Gus Dur tersebut diantaranya adalah mengembalikan NU ke Khittah seperti NU tidak akan terlibat dalam politik praktis. Kedua, NU akan menjadi motorik terhadap perdamaian dunia. Mengingat NU saat ini adalah organisasi keagamaan terbesar di dunia. Sudah sewajarnya NU mengambil peran dalam kancah dunia internasional.

Politik praktis NU memang pernah dilakukan dan NU terlibat dalam kepartaian di tahun 1955 dan ketika kepemimpinan Gus Dur NU mengembalikan fungsi dan peranan NU pada fungsi awal pada saat NU didirikan oleh kakeknya K.H. Haysim Asy'ari setelah NU merasakan betapa kerdilnya NU ketika NU masuk dalam lingkaran partai. Keputusan Gus Yahya dengan menawarkan dan mengambil langkah tegas bahwa NU dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di periode mendatang secara institusional tidak akan memberikan rekomendasi secara kelembagaan. Akan tetapi secara personal warga NU sebagai warga negara Indonesia memberikan hak sebebaskan – bebaskan untuk memilih dan memutuskan pilihannya kepada salah satu calon tertentu.

Saran

Pengembangan kajian mengenai NU ke depan tentu akan sangat kompleks sekali dan sangat menarik untuk dilakukan pengembangan kajian-kajian tentang persoalan NU di masa mendatang baik kajian lokal maupun internasional sebagai sumbangsih pemikiran tentang NU dan dunia keislaman di Nusantara.

Referensi

- Achadi, Muhamad, Dr. Purwo Santoso, (2004). *Khittah 1926 dan problematika politik NU dalam era reformasi* (Tesis Magister Universitas Gajah Mada) dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/25703#filepdf>
- A Khairul Anwar, (2014), *Makna Khittah NU* dari <https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/makna-khittah-nu-sl5Tx>
- Delvira Hutabarat (2021). *Cak Imin: Kembali ke Khittah, Bukan Berarti NU Lepas Dari Politik*. dari <https://www.liputan6.com/news/read/4832097/cak-imin-kembali-ke-khittah-bukan-berarti-nu-lepas-dari-politik>
- KKBI Kemendikbud dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/politik>
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja. Rosdakarya.

Khulasah : Islamic Studies Journal
E-ISSN: 2774-9398 / P-ISSN: 2502-3578
Volume: 04 No: 01 Tahun: 2022
" NU ANTARA POLITIK PRAKTIS DAN KHITTAH"
Sumarta
Halaman: 1-13

Puput Purwanti, (2019). *Apa Itu Politik Praktis ? dan Korelasinya Dengan Isu Sara* dari
<https://hukamnas.com/apa-itu-politik-praktis>

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umar Mukhtar, (2021). *Khittah NU 1926 dan Nahdliyyin di Pusaran Politik*. Dari
<https://www.republika.co.id/berita/qnqmmv385/khittah-nu-1926-dan-nahdliyyin-di-pusaran-politik-part1>